



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 135, Oktober 2020



Lemhannas RI dan Komisi I DPR RI Bahas RKA Lemhannas RI T.A 2021	2
Ceramah Gubernur Lemhannas RI di Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual	3
Olah Sismennas PPRA 61	4
Gubernur Lemhannas RI Jadi Pembicara Kunci Webinar Nasional Ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP	5
P3DA 11 Resmi Dibuka.....	6
Pembekalan Ketua Umum IKAL Lemhannas kepada Peserta PPRA 61	7
Pembukaan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61	8
Ceramah Ketua KPK kepada Peserta Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61.....	9
Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Lemhannas RI	10
Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Masa Bakti 2020-2025	11

Lemhannas RI dan Komisi I DPR RI Bahas RKA Lemhannas RI T.A 2021

Lemhannas RI dan Komisi I DPR RI Bahas RKA Lemhannas RI T.A 2021



Lemhannas RI mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi I DPR RI pada Senin (21/9), di Ruang Nusantara II DPR RI yang membahas terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh sejumlah pejabat Lemhannas RI, diantaranya Wagub Lemhannas RI Marsdy TNI Wieko Syofyan, Sestama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H., beserta jajaran pejabat struktural lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Agus menjelaskan mengenai fungsi, tugas, peran, dan kewenangan konstitusional Lemhannas RI yang kemudian dijabarkan di dalam RKA yang tercermin dalam proses penganggaran.

Agus menyatakan bahwa dasar dari tugas dan fungsi Lemhannas RI adalah Perpres tentang Lemhannas RI No. 98 tahun 2016. "Kami juga sedang

dalam proses untuk menyusun naskah akademik untuk mengusulkan bahwa dasar atau payung hukum Lemhannas RI yang sekarang berada pada tingkat perpres, bisa ditingkatkan menjadi payung hukum pada tingkat undang-undang", ujar Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan tugas Lemhannas RI. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan pimpinan tingkat nasional yang terdiri dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Kedua Lemhannas bertugas untuk menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan Dialog Kebangsaan, Pelatihan untuk Pelatih, dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Ketiga adalah menyusun kajian strategic baik kajian jangka panjang dan menengah, maupun quick response. Keempat adalah melakukan pengukuran ketahanan nasional.

Kemudian, Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI juga mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di tengah pandemi Covid-19, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. "Rencana kerja dan anggaran Lemhannas RI telah disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah serta peraturan pengelolaan keuangan yang bermuara pada efektif, efisien, dan mendukung percepatan pencapaian program pemerintah," ujar Agus.

Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Drs. Utut Adianto mengatakan bahwa Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran (pagu definitif) RAPBN Tahun 2021 Lemhannas RI sebesar Rp182.375.470 yang dialokasikan untuk program hubungan manajemen dan program pembinaan ketahanan nasional. "Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada badan anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," ujar Utut.

Ceramah Gubernur Lemhannas RI di Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono memberikan ceramah kepada 100 peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Virtual Angkatan I, pada Selasa, (22/9) secara dalam jaringan (daring).

Kepada para peserta yang terdiri dari birokrat, akademisi, dan organisasi masyarakat dari seluruh Indonesia, Agus menjelaskan ketahanan nasional adalah kemampuan sebuah bangsa agar dapat mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta kembali kepada bentuk semula sebagai masyarakat yang utuh berdasarkan Pancasila guna menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lemhannas RI sendiri berkonsentrasi membekalkan empat Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan mengimplementasikan Paradigma Nasional, yaitu Wawasan Nusaantara, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional. Dalam perjalanannya, empat Konsensus Dasar Bangsa dan Paradigma Nasional akan selalu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. "Oleh karena

itu kita perlu untuk waspada, bersiap-siap apabila menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut," kata Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa Ketahanan nasional diperlukan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi kumulatif dari ketahanan berbagai gatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam.

Apabila setiap gatra kondisi ketahanannya baik, maka akan menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang baik. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu ketahanan nasional merupakan gabungan dari disiplin ilmu setiap gatra. "Ketahanan nasional bukan merupakan ilmu disiplin tunggal," ujar Agus.

Menurut Agus, disiplin ilmu setiap gatra harus diolah dengan membuatnya menjadi konkret melalui kewenangan pejabat untuk mengolah teori disiplin ilmu menjadi kebijakan. Pejabat perumus kebijakan sendiri harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa setiap alumni Lemhannas RI tidak diharapkan untuk menghafal pengertian ketahanan nasional. Namun, setiap alumni diharapkan dapat memiliki kompetensi dan komitmen yang konsisten pada 4 Konsensus Dasar Bangsa. Pertama, alumni diharapkan memiliki kompetensi handal dari komitmen untuk memegang teguh ideologi bangsa Pancasila dan berkomitmen mengimplementasikannya. Kedua, alumni diharapkan berkomitmen untuk senantiasa berpegang teguh menerapkan pasal-pasal yang terkandung dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Selanjutnya yang ketiga, alumni diharapkan memiliki kompetensi dan komitmen mengutamakan kepentingan nasional, bangsa dan negara dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah. Terakhir yang keempat, alumni diharapkan berkompeten dan berkomitmen untuk senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan ragam budaya, agama, etnik, bangsa, dan golongan. "Diharapkan apa yang dibekalkan kepada peserta akan tercetak dalam sikap perilaku para alumni," ujar Agus.

Olah Sismennas PPRA 61



Sebanyak 100 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 dibagi menjadi 13 Kementerian/Lembaga dalam rangkaian kegiatan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) yang dibuka pada Selasa (22/9), di Lemhannas RI.

Olah Sismennas yang berlangsung selama empat haritersebut, merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Lemhannas RI dalam proses belajar mengajar bagi para PPRA, yakni kegiatan latihan simulasi hubungan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi antarlembaga dalam menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terselenggara secara sinergis, efektif, dan efisien serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan diselenggarakannya Olah Sismennas, diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan seluruh bidang studi yang telah diberikan. Peserta juga diharapkan mampu membuat kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka memecahkan permasalahan nasional. Selanjutnya peserta diharapkan mampu melakukan koordinasi secara lintas sektoral

melalui prosedur dan mekanisme birokrasi guna mengambil keputusan yang diperlukan. Peserta diharapkan juga mampu mengambil keputusan dalam kondisi yang serba terbatas baik dari aspek waktu/sarana prasarana yang tersedia.

Mengangkat tema "Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait Dalam Rangka Menghadapi Pandemi Covid-19", skenario Olah Sismennas menggambarkan dinamika kehidupan nasional yang diasumsikan, tetapi tetap logis. Situasi yang dimunculkan dalam Olah Sismennas dibangun sedemikian rupa sehingga tercipta kesamaan cerita dengan keadaan sesungguhnya.

Selain itu, dihadirkan juga dinamika yang mempengaruhi kehidupan nasional yang digambarkan oleh dinamika eksternal dan internal sehingga pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia menjadi lebih dinamis yang disesuaikan dengan skenario yang telah direncanakan. "Pada Olah Sismennas tahun 2020, untuk mendapatkan sistem evaluasi yang objektif dan adil, lembaga mencoba mengembangkan pola evaluasi Olah Sismennas yang di ambil dari produk perseorangan," kata Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi.

Selanjutnya Rahmat menjelaskan bahwa penyelenggaraan Olah Sismennas untuk peserta PPRA 61 kali ini sangat jauh berbeda dengan PPRA sebelumnya. Perbedaan tersebut terkait dengan metode Olah Sismennas yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi kali ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19. "Pelaksanaan Olah Sismennas dengan metode virtual baru kali ini kita laksanakan, dan kita mengharapkan, jika metode ini berhasil kita laksanakan akan menjadi model untuk kita kembangkan pada kegiatan-kegiatan Olah Sismennas selanjutnya," ujar Rahmat.

Rahmat juga menyampaikan kepada seluruh peserta untuk mencatat hal-hal yang penting agar masalah-masalah yang ditemukan selama pelaksanaan Olah Sismennas sebagai bahan evaluasi Olah Sismennas berikutnya. Kepada para penyelenggara, Rahmat berpesan untuk segera menyesuaikan dengan penggunaan metode Olah Sismennas secara virtual. "Laksanakan kegiatan Olah Sismennas ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan gambaran ataupun kemampuan kepada para peserta pada proses pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19," tutur Rahmat.

Gubernur Lemhannas RI Jadi Pembicara Kunci Webinar Nasional Ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP



Melalui kegiatan webinar nasional ini, diharapkan dapat melahirkan beberapa ide dan pemikiran yang strategis, guna tercipta rekomendasi yang terbaik dalam upaya menjaga keutuhan NKRI

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS Se-Indonesia, pada Sabtu (26/9) secara dalam jaringan (daring). Diselenggarakan secara virtual, Webinar Nasional tersebut mengangkat tema "Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Komunisme Terhadap NKRI dari Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik".

"Persamaan atau benang merah yang kita dapatkan dari 3 aspek yang pada webinar pagi hari ini, mendapatkan pokok bahasan yaitu radikalisme, intoleransi, dan komunisme," kata Agus. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa intoleransi merupakan sebuah keadaan awal yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menjurus kepada radikalisme dan komunisme.

Sedangkan menurut Agus, radikalisme dan komunisme merupakan dua buah aliran atau ideologi yang bertujuan untuk menanamkan ideologinya atau sistemnya sendiri

dengan menggantikan tatanan yang sudah ada berdasarkan sebuah dorongan atau upaya yang mencerminkan kekerasan.

Dipandang dari perspektif ilmu sosial dan ilmu politik, terdapat beberapa faktor kemunculan fenomena radikalisme, intoleransi dan komunisme. Faktor pertama menyangkut kecenderungan perubahan hubungan sosial dalam lingkup kenegaraan yang didalamnya terkandung elemen tatanan sosial yang terikat dalam sebuah sistem politik.

Faktor kedua adalah gesekan-gesekan sosial yang diakibatkan perbedaan klaim kebenaran keyakinan individu terhadap pendirian nilai-nilai sosial tertentu, yang pada akhirnya membentuk sebuah pengelompokan yang didasarkan pada keyakinan yang mana satu sama lainnya saling berbeda dan saling bertentangan.

Dan faktor ketiga yaitu tekanan sosial yang dimunculkan sebagai implikasi tekanan kepentingan tertentu

yang menimbulkan pergerakan deviatif atau tindakan yang melenceng atau menjauh dari norma kesepakatan kolektif atau yang menolak tertib sosial. Radikalisme juga menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, dengan ciri-ciri berbentuk tindakan intoleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda.

Kemudian, Agus menyampaikan bahwa ilmu-ilmu sosial dan politik diharapkan mampu mengungkap aspek proses sebab akibat dalam analisis yang komprehensif untuk menemukan akar masalah dan akibat dari fenomena dalam bidang sosial dan politik serta mencapai temuan yang komprehensif dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.

"Melalui kegiatan webinar nasional ini, diharapkan dapat melahirkan beberapa ide dan pemikiran yang strategis, guna tercipta rekomendasi yang terbaik dalam upaya menjaga keutuhan NKRI," ujar Agus menutup penjelasannya.

P3DA 11 Resmi Dibuka



Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Tahun 2020. P3DA 11 tersebut, direncanakan berlangsung selama dua bulan yang dibuka pada Senin (28/9) di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI secara daring (daring) akibat pandemi Covid-19 yang masih merebak.

Penyelenggaraan P3DA 11 ini diharapkan dapat mewujudkan pimpinan tingkat daerah yang bermoral, beretika dan berkarakter kebangsaan, memahami 4 Konsensus Dasar Bangsa meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cakrawala pandang operasional yaitu, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional, terampil dalam memecahkan masalah di daerah, serta mampu memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat I tentang kebijakan publik dan terkait nilai-nilai kebangsaan.

"Adapun tujuan diselenggarakannya P3DA 11 ini adalah untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, bermoral, beretika dan berkarakter, berwawasan kebangsaan, berfikir strategis serta terampil dalam

memecahkan masalah pembangunan nasional di daerah," ujar Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Agus mengatakan walaupun diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI berupaya seoptimal mungkin untuk mempersiapkan dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan dan akan memperhatikan protokol kesehatan selama proses pendidikan berlangsung.

"Keberadaan para peserta di Lemhannas RI, diharapkan dapat memiliki tekad untuk melakukan revolusi mental transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok pimpinan daerah dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa para peserta perlu mempunyai kemampuan membuat analisis dan keputusan serta berpikir strategis serta memiliki martabat dan kejujuran yang merupakan prasyarat utama karakter individu sebagai pimpinan

tingkat daerah. Oleh karenanya, Agus menegaskan bahwa etika, moral dan kejujuran harus menjadi pijakan utama bagi para peserta dan para peserta harus menjaga nama baik daerah tempat asal peserta mengabdikan dan bertugas.

Diakhir amanatnya, Agus mengingatkan bahwa Lemhannas RI tidak mengajar atau memberi kuliah pada para peserta. Namun, para peserta berada di Lemhannas untuk menyamakan paradigma wawasan kebangsaan dan untuk mebulatkan pencapaian proses demokratis yang telah para peserta capai. "Lemhannas RI ada untuk membantu peserta sekaligus untuk meningkatkan kualitas dharma bakti para peserta dalam kapasitas sebagai pejabat publik," kata Agus.

P3DA 11 yang direncanakan selesai pada 9 Desember 2020 nanti, diikuti sebanyak 26 peserta yang terdiri dari 9 orang bupati, 3 orang wakil bupati, 4 orang walikota, 1 orang wakil walikota, 7 ketua DPRD, 1 wakil ketua DPRD, dan 1 orang sekretaris daerah kabupaten.

Pembekalan Ketua Umum IKAL Lemhannas kepada Peserta PPRA 61



Jadilah pemimpin yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat yang melayani masyarakat

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
Ketua Umum Ikatan Keluarga Lemhannas RI

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Senin (5/10) secara dalam jaringan (daring).

Dalam kesempatan tersebut, Agum menjelaskan bahwa IKAL adalah satu-satunya organisasi dan wadah untuk para alumni Lemhannas RI. Saat ini IKAL sudah memiliki Dewan Pengurus Pusat yang baru terpilih Agustus lalu dan memiliki 30 Komisariat Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pendidikan di Lemhannas RI ini akan menghasilkan alumni-alumni yang kita harapkan ke depan menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang staf," ujar Agum.

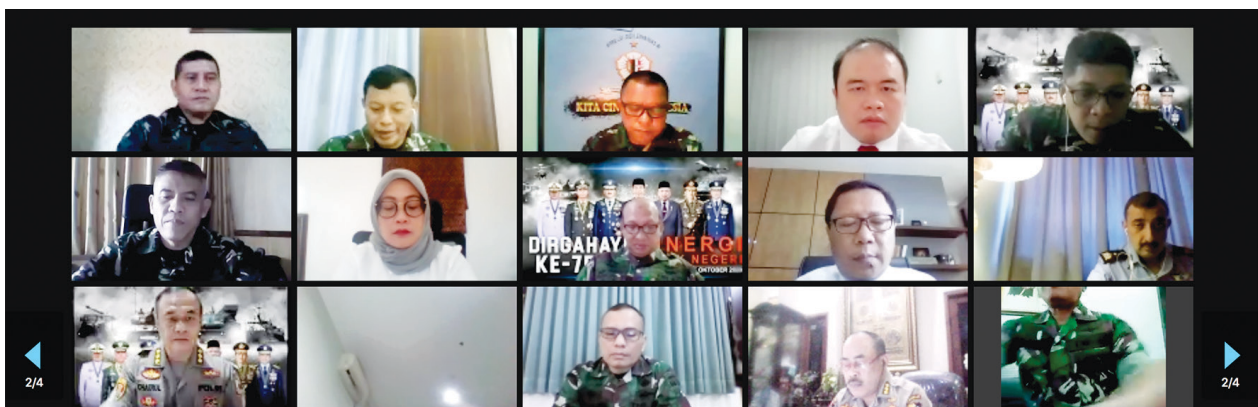


Agum sendiri berharap bahwa ketika para peserta kembali dalam melaksanakan tugas pasca pendidikan Lemhannas RI dapat menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik artinya memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulu. "Lanjutkan apa yang baik dan tinggalkan apa yang tidak baik," kata Agum.

Selain itu, Agum mengingatkan bahwa saat ini adalah era global yang kental dengan ciri kompetitif dan semakin bertambahnya peran pihak swasta.

Oleh karena itu, ke depannya peran pemerintah adalah memberdayakan, melayani, dan memfasilitasi. Artinya pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melayani masyarakat. "Jadilah pemimpin yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat yang melayani masyarakat," kata Agum.

Melihat perkembangan PPRA 61, Agum memiliki keyakinan bahwa PPRA 61 akan melahirkan pemimpin masa depan. "Saya yakin dari PPRA 61 akan lahir pemimpin ke depan," tukas Agum.



Pembukaan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61



dan mengemban tugas negara, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping, oleh sebab itu sudah sepatutnya keharmonisan suami/istri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutan pada pembukaan penataran tersebut.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa semangat kebangsaan, iklim kekeluargaan yang penuh toleransi, dan kebersamaan dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika, dapat mengalami erosi akibat arus globalisasi dan dinamika situasi politik yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dengan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh akar kerakyatan perlu semakin dikukuhkan.

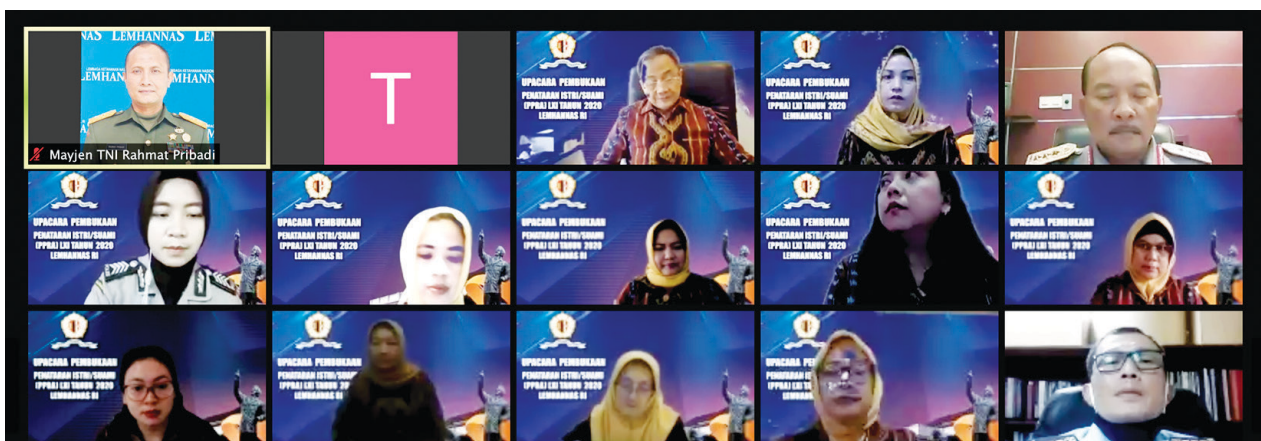
Sejalan dengan hal itu, maka hakikat penataran tersebut adalah menyiapkan para istri/suami, agar lebih memantapkan peranan dalam membantu dan mendampingi suami/istri, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. “Melalui penataran ini hendaknya dapat dipahami makna moral dan etika kebangsaan, yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Agus.

Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Lemhannas RI menggelar Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 yang dibuka pada Senin (5/10) secara dalam jaringan (daring).

Dalam laporannya, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi menyampaikan bahwa kegiatan penataran tersebut, diselenggarakan selama lima hari dan diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari 90 istri dan 6 suami.

Tujuan diadakannya penataran bagi istri/suami peserta PPRA 61 adalah untuk membekali dan memantapkan para istri/suami dalam peranannya sebagai pendamping kader pimpinan tingkat nasional, meningkatkan wawasan tentang etika bagi istri/suami yang dapat menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat, serta meningkatkan keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan antar sesama pendamping peserta PPRA 61 dan dengan Lemhannas RI.

“Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karier



Ceramah Ketua KPK kepada Peserta Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Drs. Firli Bahuri, M.Si. memberikan pembekalan kepada peserta Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61, pada Kamis (8/10) secara daring (daring).

Diawal pembekalannya, Firli mengatakan bahwa kesuksesan para peserta PPRA 61 merupakan kesuksesan para pendamping peserta. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dicapai oleh seseorang saat ini pasti ada campur tangan orang lain. Oleh karena itu, Firli menyampaikan bahwa peserta penataran harus terus berkoalisi dan membangun komunikasi dengan siapa pun.

Firli juga menegaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Firli menegaskan bahwa walaupun pemerintah berganti, tujuan negara tetap sama. "Pemerintah boleh berganti 5 tahun sekali, tapi tujuan negara tidak pernah berubah," kata Firli.

Kemudian, Firli menekankan hal yang dapat mengganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuannya adalah korupsi. "Korupsi adalah kejahatan luar biasa," ujar Firli.

Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara,



tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.

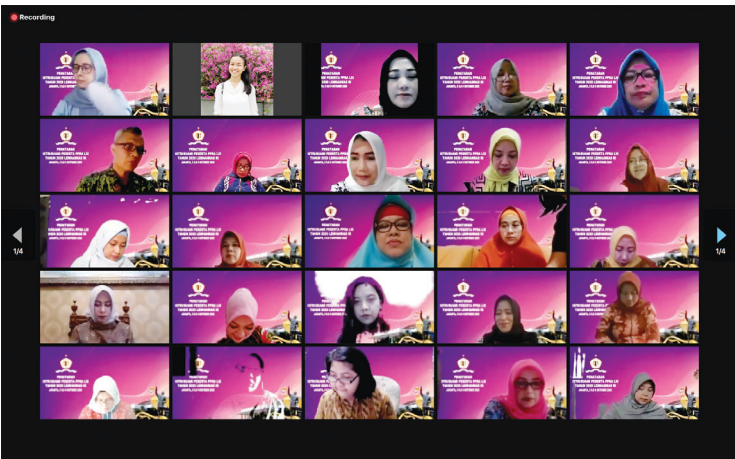
Sambung Firli, jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara gagal. "Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan," kata Firli.

Oleh karena itu, KPK kini membangun strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan. Pertama, Pendekatan Pendidikan Masyarakat dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada berbagai pihak baik rakyat, penyelenggara

negara, maupun swasta supaya tidak ingin melakukan korupsi. Melalui pendidikan, KPK juga menyebarkan bahaya korupsi dan memberikan pengertian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. "Pendidikan masyarakat menjadi penting karena kita ingin mengubah budaya, budaya yang koruptif menjadi budaya anti korupsi," kata Firli.

Kedua, Pendekatan Pencegahan yang dilakukan karena kejahatan muncul didorong oleh sistem yang buruk, sistem yang lemah, dan sistem yang gagal. Dalam melakukan pencegahan, KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak ada peluang korupsi. Salah satunya adalah dengan membuat kajian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem.

Dan ketiga, Pendekatan Penindakan yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. "Tiga pendekatan ini dilakukan secara bersinergi, berbarengan, simultan, dan berkesinambungan" pungkas Firli.



Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta **Pelepasan Pejabat Lemhannas RI**



Upacara pelantikan ini merupakan ketiga kalinya dilaksanakan berbeda dari biasanya, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia dan bahkan di banyak negara," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo pada Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Eselon, pada Kamis (15/10).

Seperti upacara pelantikan dan pelepasan sebelumnya, upacara tersebut hanya dihadiri langsung oleh 5 perwakilan pejabat yang dilantik dan 5 perwakilan pejabat tinggi Lemhannas RI, sedangkan tamu undangan lainnya menghadiri melalui *conference call*.

Dari sejumlah pejabat yang dilantik, salah satu di antaranya adalah Deputy Bidang Pemanjangan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. Sedangkan, salah satu pejabat yang dilepas adalah Tenaga Pengajar Marsda

TNI Julexi Tambayong untuk bertugas menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI.

"Pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi bukanlah sekedar kepercayaan dan kehormatan semata, tetapi juga merupakan amanah," kata Agus. Oleh karena itu, Agus berpesan agar para pejabat melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dengan melakukan yang terbaik.

Selanjutnya Agus menyampaikan selamat datang kepada 22 pejabat eselon I, II, III, dan IV atas jabatan baru yang telah diberikan oleh negara dan mengucapkan selamat datang di lingkungan Lemhannas RI. Agus berharap setiap pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan kerja di Lemhannas RI.

"Jadikan tugas sebagai amanah, tanggung jawab dan kehormatan yang

dijunjung setinggi-tingginya," kata Agus. Agus yakin dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, pejabat yang dilantik akan mampu berperan aktif dan menerapkan standar tinggi dalam bekerja, menularkan komitmen kuat pada semua lini untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, produktivitas dan profesionalisme.

Menurut Agus, kepemimpinan dan keteladanan setiap pejabat yang dilantik akan sangat menentukan sukses dan lancarnya program maupun sasaran organisasi, karena sikap pimpinan sangat menentukan sikap bawahan dan pegawai lainnya.

Mengakhiri sambutannya, Agus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 13 pejabat eselon I, II, dan III yang dilepas atas pengabdian dan kerja keras selama ini. Agus menegaskan bahwa kinerja dan seluruh prestasi tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Masa Bakti 2020-2025



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL masa bakti 2020-2025, pada Kamis (15/10), di Ruang Konsitusi, Gedung Trigatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Musyawarah Nasional ke-IV IKAL yang diadakan Agustus lalu telah menghasilkan DPP IKAL masa bakti 2020-2025 dengan susunan Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Wakil Ketua Umum I Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si, Wakil Ketua Umum II Komjen Pol. (Purn.) Drs. Togar M Sianipar, M.Si., Sekretaris Jenderal Marsdya TNI (Purn.) Daryatmo, S.I.P, Bendahara Umum Dadan Irawan Sarpingi, B.A., MIBA, Koordinator Bidang Organisasi dan Taplai Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M., Koordinator Bidang Advokasi dan Hubungan Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin, M.Sc., Koordinator Bidang Usaha dan Keluarga Mayjen TNI (Purn) Dr. Bimo Prakoso, M.P.A, M.A., dan Koordinator Bidang Telematika dan

Humas Dr. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si.

“Di tengah pasang surut dan dinamika kehidupan nasional, IKAL selama ini senantiasa menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memberikan berbagai sumbangsuhnya,” kata Agus saat memberikan sambutan.

Terlebih lagi menurut Agus, pada masa pandemi Covid-19, IKAL telah menunjukkan kepeduliannya dalam mendukung penanggulangan virus Covid-19. Dengan capaian ikal tersebut, Agus yakin bahwa IKAL Lemhannas RI ke depannya semakin berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IKAL saat ini tidak hanya terpusat, tetapi telah memiliki 30 komisariat provinsi yang memudahkan dalam konsolidasikan dengan para anggota IKAL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Agus berharap bahwa ke depannya, IKAL harus semakin tumbuh dan berkembang sebagai tempat bersandar bagi seluruh komponen bangsa yang mendambakan Indonesia

yang bersatu, maju dan sejahtera. Agus juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI dan IKAL bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. “IKAL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lemhannas RI,” ungkap Agus.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menegaskan bahwa kehadiran alumni Lemhannas RI yang tersebar di daerah, perlu diberdayakan dan dimanfaatkan dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aktivitas seperti yang termuat dalam misi IKAL.

Dalam misi yang lain, anggota IKAL juga harus membangun dan meningkatkan kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan serta mempererat tali silaturahmi sesama alumni dalam rangka memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara serta mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan masalah bangsa serta memberikan solusi yang tepat untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Pembuat Artikel: **Naomi Augustina** Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia**

Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>